BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas disusun dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan laporan kinerja Kabupaten Padang lawas tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan strategis, rencana kerja pemerintah daerah dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan. Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan beserta indikatornya, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja baik positif atau negatif (*peformance gap*). selanjutnya atas dasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapat strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Terhadap Sasaran dan indikator kinerja antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja level Pemda Tahun 2024 telah direvisi kembali sesuai indikator kinerja utama yang ditetapkan pada PRPJMD 2020-2024 Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2021 yang digambarkan pada penjenjangan kinerja (Pohon Kinerja/ *logical framework*(*https://drive.google.com/file/d/1rv-93Rq7FwIRI5uZ41XorAePAtz9Q4oh/view?usp=sharing*)) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Dalam PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Tujuan/Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Lawas, Revisi Sasaran dan indikator kinerja pada IKU dan PK Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2020-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, kualitas pelayanan publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran berdasarkan nilai komponen RB General dan RB Tematik	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan predikat sebagai berikut: AA>90-100 = Istimewa AA>80-90 = Sangat Istimewa BB>70-80 = Baik BB> 60-70 = Cukup Baik CC>50-60 = Cukup C>30-50 = Buruk D>0-30 = Sangat Buruk	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Nilai Akuntbilitas Pemerintah (AKIP)	Pengukuran berdasarkan komponen nilai Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan predikat sebagai berikut: AA>90-100 = Sangat memuaskan A>80-90 = Memuaskan BB>70-80 = Sangat Baik B> 60-70 = Baik CC>50-60 = Cukup (memadai) C>30-50 = Kurang D>0-30 = Sangat Kurang	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran berdasarkan pengisian kusioner berpedoman pada PermenPAN 14 Tahun 2017	Laporan evaluasi pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat dari KemenPANRB dengan predikat sebagai berikut: A. 88,31-100,00 =Sangat Baik B. 76,61-88,30 = Baik C. 65,00-76,60 =Kurang Baik D. 25,00-64,99 = Tidak Baik	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
		Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	- WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) - WDP (Wajar Dengan Pengecualian) - TW (Tidak Wajar) dan - TMP (Tidak Memberikan Pendapat)	Hasil evaluasi LKPD terhadap Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)	BPKAD dan Inspektorat
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Pengukuran tingkat kematangan (maturity level) diterapkan pada setiap indikator, dimana setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut: i. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu); ii. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua); iii. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga); iv. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); v. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima). Sedangkan untuk penghitungan nilai indeks tingkat kematangan SPBE, terdiri atas: i. indeks aspek; ii. indeks domain; dan iii. indeks SPB	Masing-masing nilai indeks tersebut dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator. Penghitungan nilai indeks aspek, indeks domain, dan indeks SPBE di formulasikan dan telah tertuang pada masingmasing pedomannya, baik pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020. Kemudian, Nilai Indeks yang diperoleh dari hasil pemantauan dan evaluasi SPBE merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE yang dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut: Predikat Indeks SPBE - 4,2-5,0 Memuaskan - 3,5-<4,2 Sangat Baik - 2,6-<3,5 Baik - 1,8-<2,6 Cukup - <1,8 Kurang	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	IP = Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS)+ Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/2	Indeks Rata-Rata Lama Sekolah 2/3 = Bobot IMH yang ditetapkan secara arbitrer oleh UNDP 1/3 = Bobot ILS yang ditetapkan secara arbitrer oleh UNDP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan BPS

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
3.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	(AHH - AHHmin) / (AHHmaks - AHHmin)	Indeks kesehatan merupakan ukuran yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi kesehatan, yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat. ndikatornya adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.	Dinas Kesehatan dan BPS
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraaan dan perlindungan sosial PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai standar	Jumlah PPKS yang mendapat layanan sesuai standar dibagi jumlah populasi PPKS dikali 100%	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar atau SOP yang telah ditetapkan	Dinas Sosial
	Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang diberikan pelatihan	(Jumlah tenaga kerja terlatih / jumlah Pengangguran terbuka) x100%	diambil dari data angkatan kerja yang sudah terlatih dan mempunyai sertifikasi	Dinas Ketenagakerjaan
5.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan	Jumlah produksi dan produktivitas tanaman pangan	Jumlah Produksi pertanian pangan perhektar pertahun dibagi luas panen dikali 100%		Dinas Pertanian
6.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perikanan	Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan	(((angka produksi kelautan dan perikanan(n) - angka produksi perikanan (n- 1)) / angka produksi perikanan (n-1))) x 100 %	perikanan perlu dibedakan pada perikanan budidaya dan tangkap	Laporan Statistik tahunan Dinas Perikanan dan Peternakan
7.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Kondisi jalan mantap	Jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang dibagi jumlah panjang jalan kab/kota dikali 100%	Nilai kondisi jalan disurvei dengan menggunakan aplikasi *Provincial Kabupaten Road Management System (PKRMS)* dan menghasilkan nilai *Treatment Trigger Index (TTI)* dengan klasifikasi kondisi jalan berdasarkan nilai TTI: 0 – 25: Baik 25 – 75 : Sedang 75 – 100 : Rusak ringan > 100: Rusak berat	Hasil survey oleh Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase rumah tangga bersanitasi	Jumlah Rumah tangga bersanitasi / Total Rumah x 100	Jumlah rumah tangga yang bersanitasi di sebuah daerah berbanding dengan	Hasil survey oleh Dinas Perumahan,

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				jumlah total rumah di daerah tersebut	Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan,
		Persentase rumah layak huni	Jumlah Rumah Layak Huni / Total Rumah x 100	Jumlah rumah yang layak huni di sebuah daerah berbanding dengan jumlah total rumah di daerah tersebut	
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	KLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indek Kualitas tutupan lahan (IKL)merupakan salah satu komponen perhitungan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihitung sesuai Peraturan Menteri lingkungan Hidup nomor 27 Tahun 2021	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2020-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, kualitas pelayanan publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran berdasarkan nilai komponen RB General dan RB Tematik	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan predikat sebagai berikut: AA>90-100 = Istimewa AA>80-90 = Sangat Istimewa BB>70-80 = Baik BB> 60-70 = Cukup Baik CC>50-60 = Cukup C>30-50 = Buruk D>0-30 = Sangat Buruk	BKPSDM, DPMPTSP, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Nilai Akuntbilitas Pemerintah (AKIP)	Pengukuran berdasarkan komponen nilai Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan predikat sebagai berikut: AA>90-100 = Sangat memuaskan A>80-90 = Memuaskan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				BB>70-80 = Sangat Baik B> 60-70 = Baik CC>50-60 = Cukup(memadai) C>30-50 = Kurang D>0-30 = Sangat Kurang	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran berdasarkan pengisian kusioner berpedoman pada PermenPAN 14 Tahun 2017	Laporan evaluasi pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat dari KemenPANRB dengan predikat sebagai berikut: A. 88,31-100,00 =Sangat Baik B. 76,61-88,30 = Baik C. 65,00-76,60 =Kurang Baik D. 25,00-64,99 = Tidak Baik	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	- WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) - WDP (Wajar Dengan Pengecualian) - TW (Tidak Wajar) dan - TMP (Tidak Memberikan Pendapat)	Hasil evaluasi LKPD terhadap Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)	BPKAD dan Inspektorat
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Pengukuran tingkat kematangan (maturity level) diterapkan pada setiap indikator, dimana setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut: i. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu); ii. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua); iii. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga); iv. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); v. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima). Sedangkan untuk penghitungan nilai indeks tingkat kematangan SPBE,	Masing-masing nilai indeks tersebut dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator. Penghitungan nilai indeks aspek, indeks domain, dan indeks SPBE di formulasikan dan telah tertuang pada masing-masing pedomannya, baik pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020. Kemudian, Nilai Indeks yang diperoleh dari hasil pemantauan dan evaluasi SPBE merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE yang dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut: Predikat Indeks SPBE - 4,2-5,0 Memuaskan - 3,5-<4,2 Sangat Baik - 2,6-<3,5 Baik - 1,8-<2,6 Cukup - <1,8 Kurang	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
			terdiri atas: i. indeks aspek; ii. indeks domain; dan iii. indeks SPB		
2.	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	IP = Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS)+ Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/2	Indeks Rata-Rata Lama Sekolah 2/3 = Bobot IMH yang ditetapkan secara arbitrer oleh UNDP 1/3 = Bobot ILS yang ditetapkan secara arbitrer oleh UNDP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan BPS
3.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	(AHH - AHHmin) / (AHHmaks - AHHmin)	Indeks kesehatan merupakan ukuran yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi kesehatan, yaitu Umur Panjang dan Hidup sehat. Indikatornya adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan	Dinas Kesehatan dan BPS
4.	Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	IPM=$\sqrt[3]{}$ I*kesehatan X Ipendidikan X Ipengeluaran X100*	• Apabila nilai IPM kurang dari 50 maka IPM rendah; • Apabila nilai IPM antara 50 sampai 80 (50<IPM<80) maka termasuk kategori sedang; • Apabila nilai IPM diatas 80 menunjukkan IPM tinggi	Disdikbud, Dinkes dan Dinas Sosial
5.	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi- umbian + ...+ skor PPH kelompok lain-lain.	- Jika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor maksimum - Jika skor AKE lebih rendah dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor AKE.	Dinas Pertanian, Dinas Ketapang dan Dinas Perikanan dan peternakan
6.	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi publik	Kondisi jalan mantap	Jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang dibagi jumlah panjang jalan kab/kota dikali 100%	Nilai kondisi jalan disurvei dengan menggunakan aplikasi *Provincial Kabupaten Road Management System (PKRMS)* dan menghasilkan nilai *Treatment Trigger Index (TTI)* dengan klasifikasi kondisi jalan berdasarkan nilai TTI:	Hasil survey oleh Dinas Pekerjaan Umum

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				0 – 25: Baik 25 – 75 : Sedang 75 – 100 : Rusak ringan > 100: Rusak berat	
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi	Jumlah Rumah tangga bersanitasi / Total Rumah x 100	Jumlah rumah tangga yang bersanitasi di sebuah daerah berbanding dengan jumlah total rumah di daerah tersebut	Hasil survey oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan,
		Persentase rumah layak huni	Jumlah Rumah Layak Huni / Total Rumah x 100	Jumlah rumah yang layak huni di sebuah daerah berbanding dengan jumlah total rumah di daerah tersebut	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	KLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 xIKL)	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indek Kualitas tutupan lahan (IKL)merupakan salah satu komponen perhitungan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihitung sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 27 Tahun 2021	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Perubahan Tujuan/sasaran dan indikator kinerja (IKU) terdapat 8 tujuan/sasaran menjadi 7, perubahan tersebut pada nomor 4,5,6,7 dan 8, perubahan ini dilakukan agar memenuhi kreteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound*) untuk mengukur sasaran strategisnya. Pada nomor 4 Dua Sasaran strategis " Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan dan perlindungan sosial (PPKS) dengan indikator kinerja " Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai standar dan Persentase tenaga kerja yang diberikan pelatihan" dan "Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja dengan indikator kinerja Persentase tenaga kerja yang diberikan pelatihan" diubah menjadi satu sasaran strategis yaitu " Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM)".

Perubahan tujuan/sasaran pada nomor 5 dan 6 yaitu “Meningkatnya prodiksi dan produktivitas tanaman pangan dengan indikator Jumlah produksi dan produktivitas tanaman pangan, Meningkatnya Daya Saing Sektor Perikanan dengan indikator Jumlah peningkatan prosuksi perikanan” diubah menjadi satu sasaran strategis yaitu “ Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)”.

Sasaran strategis pada nomor 7 dan 8 yaitu “Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dengan indikator Kondisi jalan mantap, Persentase rumah tangga bersanitasi dan Persentase rumah layak huni” diubah menjadi sasaran strategisnya “ Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur jalan dan transformasi publik dengan indikator Jalan Mantap” sedangkan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup” diubah yaitu sasaran strategis “ Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air bersih dan sanitasi dengan indikator Persentase rumah tangga bersanitasi, Persentase rumah layak huni dan Indeks kualitas lingkungan hidup”.

Ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah utamanya mengacu pada Perubahan RPJMD periode Tahun 2020 – 2024, akan tetapi berdasarkan laporan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dimana terdapat indikator kinerja pada PK Pemda belum memenuhi ktriteria SMART, berdasarkan hal terdebut Pemda melakukan perbaikan dokumen perencanaan sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil sesuai visi misi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas target kinerja dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks reformasi birokrasi	Nilai (Kategori)	70
		Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai (Predikat)	65
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (Predikat)	82
		Opini BPK Terhadap Laporan kinerja Keuangan Daerah	Opini	WTP
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	2,9
2	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	74,53
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	73
4	Meningkatnya derajat kualitas Hidup sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,05
5	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	Skor Pola Harapan Pangan (PPH)	Persen	77,5
6	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi publik	Kondisi Jalan Mantap	Persen	62
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, Air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	80
		Persentase rumah layak huni	Persen	66
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73,12

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Kabupaten Padang Lawas berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 100.3.3.2/236/KPTS/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator

Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Padang Lawas Tahun 2024.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \text{ X } 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90- 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: SK Bupati padang Lawas Tentang Pertek Evaluasi SAKIP 2023

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Katego	70	57,99	83
		Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Predikat (Nilai)	65	56,28	87
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat (Nilai)	82	88,66	108
		Opini BPK Terhadap Laporan kinerja Keuangan Daerah	Opini	WTP	WDP	85
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persen	2,9	2,17	75
2	Meningkatnya kualitas derajat	Indeks pendidikan	Persen	74,53	18,52	25
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	Indeks kesehatan	Persen	73	71,67	98

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya derajat kualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,05	73,10	107
5	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	Skor Pola Harapan Pangan (PPH)	Persen	77,5	88,6	114
6	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi publik	Kondisi Jalan Mantap	Persen	62	34	55
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, Air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	80	80	100
		Persentase rumah layak huni	Persen	66	0	0
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73,12	67,52	92

Dari 7 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut :

Tabel 3.4

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Memuaskan	5	6
2	Memuaskan	1	2
3	Sangat Baik	1	1
4	Baik	0	0
5	Cukup (memadai)	2	2
6	Kurang	0	0
7	Sangat Kurang	2	2

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	>0-30	>30-50	>50-60	>60-70	>70-80	>80-90	>90- 100
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas	Indeks reformasi birokrasi	57,99			Cukup				
		Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	86,5	-	-	-	-	-	memuaskan	-
		Indeks	105	-	-	-	-	-	-	Sangat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	>0-30	>30-50	>50-60	>60-70	>70-80	>80-90	>90- 100
	Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Kepuasan Masyarakat								memuaskan
		Opini BPK Terhadap Laporan kinerja Keuangan Daerah	85	-	-	-	-	-	memuaskan	-
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	74,8	-	-	-	-	Sangat baik	-	-
2	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	25	Sangat kurang	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	98	-	-	-	-	-	-	Sangat memuaskan
4	Meningkatnya derajat kualitas Hidup sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	107	-	-	-	-	-	-	Sangat memuaskan
5	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	Skor Pola Harapan Pangan (PPH)	114	-	-	-	-	-	-	Sangat memuaskan
6	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi publik	Kondisi Jalan Mantap	54	-	-	Cukup	-	-	-	-
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, Air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi	100	-	-	-	-	-	-	Sangat memuaskan
		Persentase rumah layak huni	0	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	92	Sangat kurang	-	-	-	-	-	Sangat memuaskan

C. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator	Data Awal	Target				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks Reformasi Birokrasi	0	70	70	70	70	0	46,78 (C)	46,31 (C)	57,99 (CC)	0	66,8	66	82,8
	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	40,16 (C)	65 (B)	65 (B)	65 (B)	65 (B)	41,17 (C)	52.07 (CC)	53,03 (CC)	56,28 (CC)	63,3	80	81,5	86,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (80)	B (82)	B (82)	B (82)	B (82)	B (83,64)	B (83,26)	B (84,03)	A (88,66)	102	101	102	108
	Opini BPK Terhadap Laporan kinerja Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	100	100	85	85
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	0	80	90	95	2,9	0	1,72	2,02	2,17	0	57	67	74,8
Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	66,22	68,21	70,25	72,36	74,53	17,38	17,97	18,13	18,52	25	25	25	25
Menigkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	70,15	71,55	71,56	72,28	73	67,13	67,43	67,71	71,67	94	94	94	98
Meningkatnya derajat kualitas Hidup sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	68,25	67,78	68	68,05	68,05	70,48	71,41	72,16	73,10	103	105	106	107
Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	Skor Pola Harapan Pangan (PPH)	0	74,5	75,5	76,5	77,5	75,6	85,3	86	88,6	101	112	112	114
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi publik	Kondisi jalan mantap	49	53	56	59	62	18,43	21	27	34	34	37	45	54
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, Air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi	0	63	68	75	80	0	0	61	80	0	0	81	100
	Persentase rumah layak huni	60,90	62	64	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0	71,52	72,04	72,6	73,12	0	70,99	69,11	67,52	0	98,5	95	92,3
Rata-rata Capaian Kinerja											**47,8**	**67**	**73,8**	**79**

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Keuangan Daerah melalui penerapan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik.

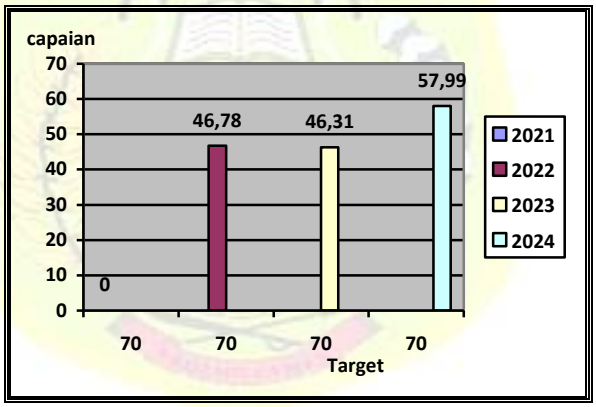
Hasil pengukuran kinerja sasaran capaian kinerja "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Keuangan Daerah melalui penerapan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik" dengan 5 indikator kinerja yaitu :

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.1

Indeks Reformasi Birokrasi



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Padang Lawas dimulai pada Tahun 2022 dengan nilai indeks reformasi 46,78 dengan predikat C, dan pada Tahun 2023 capaian indeks reformasi birokrasi sebesar 46,31 dengan predikat C belum mencapai target dalam perjanjian kinerja yaitu nilai 70 (B). Menurunnya capaian tersebut karena tidak terpenuhinya semua kretaria Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2024 kekurangan kriteria-kriteria dalam penilaian reformasi birokrasi sudah ditindaklanjuti seperti keabsahan rencna aksi reformasi birokrasi dan keabsahan perubahan *roadmap* 2024 dengan menyusun sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, melakukan reviu dan memperbaiki dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 oleh Kementerian PANRB RI yaitu 57,99 (CC) dengan indikator RB General sebesar 50,02 dari total

bobot RB General 100 sedangkan RB Tematik sebesar 7,97 dari total bobot 22 walupun demikian target dalam perjanjian kinerja belum tercapai yaitu dengan nilai 70 (B).

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penetapan keabsahan dokumen perencanaan strategis atas rencana aksi reformasi birokrasi birokrasi instansi pemerintah;
2. Menumbuhkan pola budaya kerja setiap pegawai dengan memberikan model/contoh para pimpinan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum menyampaikan keabsahan atas dokumen rencana aksi reformasi birokrasi;
2. Terdapat indikator kegiatan utama instansi yang belum ada penetapan targetnya;
3. Terdapat terget reformasi birokrasi nasional yang belum dikawal dalam target kegiatan utama instansi;
4. Sasaran kegiatan utama yang belum dikawal dengan rencana aksi yang relevan.

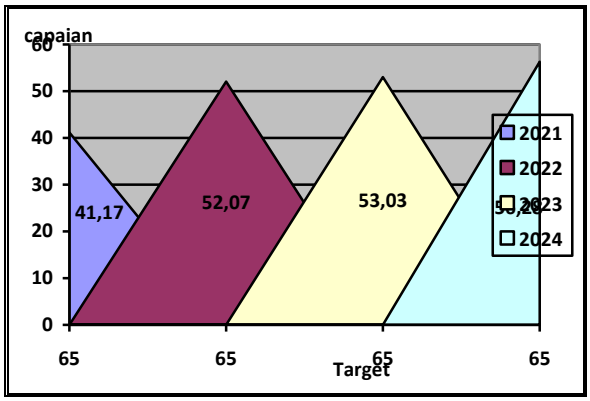
Solusi atas masalah yang dihadapi yaitu menindak lanjuti hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenpanRB RI dan membuat rencana aksi atas evaluasi tersebut sebagaimana telah di jelaskan diatas.

b. Nilai Akuntabilitas Pemerintah

Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.2

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja



Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

hanya meningkat 1 persen setiap tahun. Tahun 2021 dengan nilai 41,17, Tahun 2022 dengan nilai 52,07, Tahun 2023 dengan nilai 53,03 dan pada Tahun 2024 dengan nilai 56,28, belum mencapai target pada perjanjian kinerja setiap tahunnya, pada Tahun 2024 hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebesar 56,28 (CC) hal ini menunjukkan implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja seperti penyampaian PK tahun berjalan pada setiap PD belum sesuai dengan penjenjangan kinerja, dokumen perencanaan belum belum berorientasi hasil, renca aksi PD belum selaras dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dll. Pada Tahun ini beberapa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sudah ditindaklanjuti seperti perbaikan dokumen PK, IKU sudah diselaraskan, keabsahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, data kinerja tersebut akan dikumpulkan mulai Tahun 2025, penjenjangan kinerja sudah teridentifikasi *critical succsess factor* dan menginformasikan laporan kinerja pemda pada laman resmi pemda *Padanglawaskab.go.id.*

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meindaklanjuti hasil evaluasi monitoring LHE AKIP internal;
2. Menyelaraskan Perjnjian Kinerja dengan e-kinerja MyASN;
3. Melakukan Bimtek tentang akselerasi akuntabilitas dan reformasi birokrasi daerah;
4. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pada sebagian besar PD belum diukur dengan indikator kinerja yang sesuai dan cukup untuk menggambarkan kinerja outcome yang seharusnya diwujudkan;
2. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual, belum memanfaatkan teknologi informasi;
3. Hasil evaluasi internal belum sepenuhnya tepat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD.

Solusi atas masalah yang dihadapi yaitu menindak lanjuti LHE internal dan LHE

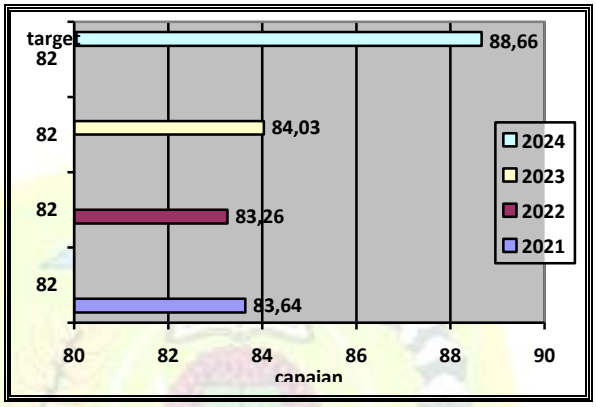
KemenpanRB RI sebagaimana telah di jelaskan diatas.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas terutama pada pelayanan di bidang pelayanan kesehatan, perizinan. Capaian kinerja IKM dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3

Capaian IKM



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas secara umum kualitas pelayanan setiap unit pelayanan dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh pada tahun 2024 semester 1 menunjukkan capaian yang sangat baik dengan skor rata-rata 88,66.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran para penyelenggara pelayanan publik pentingnya meningkatkan kegiatan survei kepuasan masyarakat sebagai tugas dan tanggungjawabnya yang dapat membawa dampak positif sehingga hasilnya sesuai standar pelayanan yang diharapkan atau yang ditentukan organsasi;
2. Kemampuan dan keterampilan petugas pelayanan yang memadai dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia , sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik serta rendahnya kesadaran para penyelenggara

pelayanan publik yang tidak tepat waktu melaporkan dan melakukan survey kepuasan masyarakat;

Solusi atas masalah yang dihadapi yaitu agar pemerintah daerah meningkatkan profesianalosme aparatur, memperbaiki sistem manajemen kualitas dan mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pelayanan sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih memuaskan dan sesuai dengan harapan masyarakat dan terus melakukan pembinaan terhadap opd agar melaksanakan SKM dan hasilnya dilaporkan sesuai jadwal yg ditentukan.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mendapat piagam penghargaan dari OMBUDSMAN dengan nilai 85,26 (zona Hijau).

Gambar 3.1
Piagam Penghargaan OMBUDSMAN Tahun 2024



d. Opini BPK

Berdasarkan hail pemeriksaaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemda kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 memberikan opini WDP terhadap laporan keuangan keuangan dari 46 Perangkat Daerah 1 Kelurahan ditemukan 3 Perangkat Daerah yang ditemukan adanya beberapa transaksi material yang dapat mengganggu kewajaran laporan.

Oleh karena itu Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yaitu WDP terhadap 46 PD 1 Kelurahan (85%), kedepannya untuk mencapai WDP supaya memperhatikan dan menindak lanjuti hasil evaluasi BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pengendalian internal instansi pemerintah;
2. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kelemahan sistem pengendalian yang terkait dengan kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan;
2. Kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan Negara/daerah/perusahaan serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa;
3. Kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa

Solusi atas masalah yang dihadapi:

1. Mencatat dan memproses laporan tepat waktu sesuai ketentuan;
2. Meningkatkan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya;
3. Menyusun SOP dan mengoptimalkan satuan pengawas internal.

d. Indeks SPBE

Perbandingan capaian Indeks SPBE tahun sebelumnya meningkat dari 2,02 menjadi 2,17 (cukup), jika dibandingkan dengan indeks SPBE Kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara 2,26 (cukup), dimana indeks SPBE Kabupaten Padang Lawas masih rendah, maka perlu meningkatkan tatakelola dan manajemen SPBE. Hasil penilaian SPBE oleh Kementerian PANRB Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara Tahun 2024

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,86	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,57	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,66	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	2,38	Cukup
6	Pemerintah Kab. Simalungun	2,37	Cukup
7	Pemerintah Kab. Dairi	2,69	Baik
8	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,85	Baik
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	3,14	Baik
10	Pemerintah Kab. Asahan	2,86	Baik
11	Pemerintah Kab. Nias	3,72	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Toba	2,95	Baik
13	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,89	Baik
14	Pemerintah Kab. Nias Selatan	2,90	Baik
15	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2,80	Baik
16	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,66	Baik
17	Pemerintah Kab. Samosir	2,70	Baik

18	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,65	Baik
19	**Pemerintah Kab. Padang Lawas**	**2,17**	**Cukup**
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	2,26	Cukup
21	Pemerintah Kab. Batubara	2,67	Baik
22	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1,93	Cukup
23	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	2,78	Baik
24	Pemerintah Kab. Nias Barat	1,80	Kurang
25	Pemerintah Kab. Nias Utara	2,41	Cukup
26	Pemerintah Kota Medan	3,67	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3,79	Sangat Baik

Sumber data: menpan.go.id 2024

Evaluasi penerapan SPBE pada beberapa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pencapaian yang begitu baik. Dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 6 Sangat Baik, 14 Baik, 6 Cukup dan 1 Kurang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE pada beberapa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menempati urutan kelima dengan predikat “Cukup” dan memiliki indeks 2,17. Selanjutnya dikuti oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan indeks 1,93.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Relasi Antar Organisasi, Enterprise Architecture, Regulasi, Manajemen Perubahan, Data dan Informasi, Aplikasi, Program dan Proyek TI, Sumber Daya Manusia, dan Pengambilan Keputusan

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

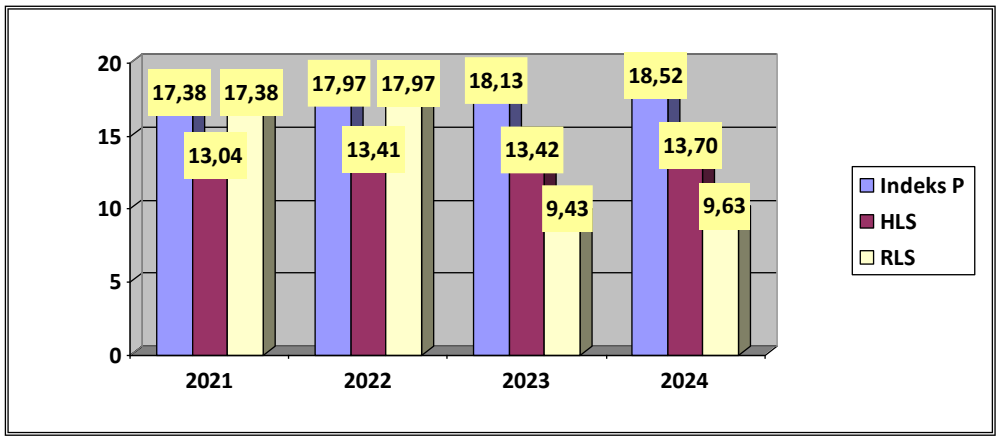
1. Belum menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA.

Solusi atas masalah yang dihadapi yaitu menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA, selain itu memastikan penerapan SPBE dilakukan berdasarkan perencanaan SPBE yang telah disusun. Manajemen Risiko SPBE perlu disusun dan diterapkan agar program kegiatan yang terarah dan terencana.

2. Meningkatnya Kualitas Derajat Pendidikan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat” dengan satu indikator adalah sebesar 18,52. Indeks Pendidikan dibentuk dua indikator, yaitu HLS penduduk usia 7 tahun keatas dan RLS penduduk usia 25 tahun keatas. Kedua indikator dari tahun ke tahun terus meningkat. Capaian Indeks Pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Capaian HLS dan RLS Kabupaten Padang Lawas



Sumber data: Disdikbud Kab. Padang Lawas 2024

Harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,17 tahun pada tahun 2024 (1,24 persen) dibandingkan tahun 2023, dari 13,42 menjadi 13,70 tahun, Selama satu periode rata-rata meningkat 1,58 persen per tahun,sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,20 tahun, dari 9,43 tahun menjadi 9,63 tahun pada tahun 2024, selama periode sampai tahun 2024 rata-rata meningkat 1,68 persen per tahun.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan, pendapatan per kapita, Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMP, Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMA, dan rasio murid-guru tingkat SD.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan, pendapatan per kapita, Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMP, Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMA, dan rasio murid-guru tingkat SD

Solusi atas masalah yang dihadapi menambah Alokasi belanja pemerintah daerah bidang **pendidikan**, pendapatan per kapita, Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMP, Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMA, dan rasio murid-guru tingkat SD.

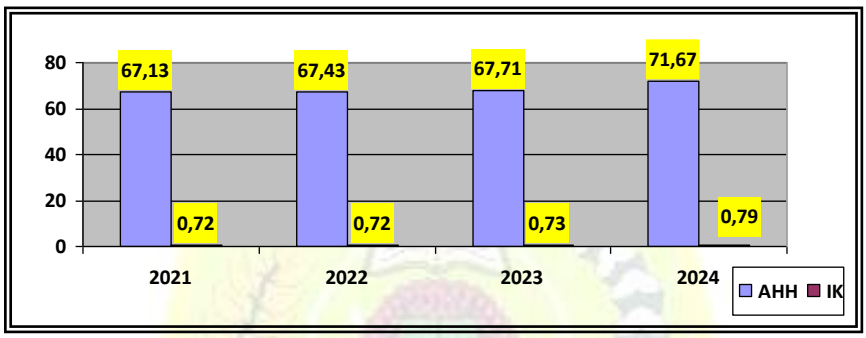
3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pada dimensi kesehatan, umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 71,67 tahun, meningkat 0,15 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sumber data umur harapan hidup (UHH) saat lahir menggunakan hasil *Log Form SP2020* (SP2020-LF).

UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2021 hingga 2024, UHH Kabupaten Padang Lawas meningkat sebesar 0,69 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2021, UHH Kabupaten Padang Lawas sebesar 67,13 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 71,67 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,15 tahun (0,21 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup minimal umur 20 Tahun dan Angka Harapan Hidup maksimal adalah 80 Tahun.

Grafik 3.5
Capaian Indeks Kesehatan



Sumber data: Dinas Kesehatan 2024 dan BPS Kab. Padang Lawas 2024

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Akses pelayanan kesehatan;
- Kualitas lingkungan seperti polusi udara, perubahan iklim, dan kualitas air dapat berdampak pada kesehatan;
- Pendidikan merupakan salah satu factor determinan social kesehatan;
- Pekerjaan seseorang juga dapat memengaruhi kesehatan;
- Penghasilan seseorang dapat memengaruhi kemampuannya untuk membayar jaminan kesehatan;
- Ketersediaan pangan dan air bersih yang memadai dapat mendukung kesehatan;
- Keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai dapat mendukung pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Sumber daya, seperti tenaga medis yang tidak merata, sarana prasarana, dan anggaran;

- Kurangnya kualitas sumber daya manusia kesehatan;
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi;
- Kurangnya pemahaman SOP;
- Kurangnya motivasi;
- Kurangnya disiplin;
- Keterlambatan layanan;
- Kualitas lingkungan yang rendah.

Solusi atas masalah yang dihadapi:

- Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil serta meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas.
- Peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Melalui program-program partisipatif seperti Posyandu, penyuluhan kesehatan, dan kampanye kesehatan, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya

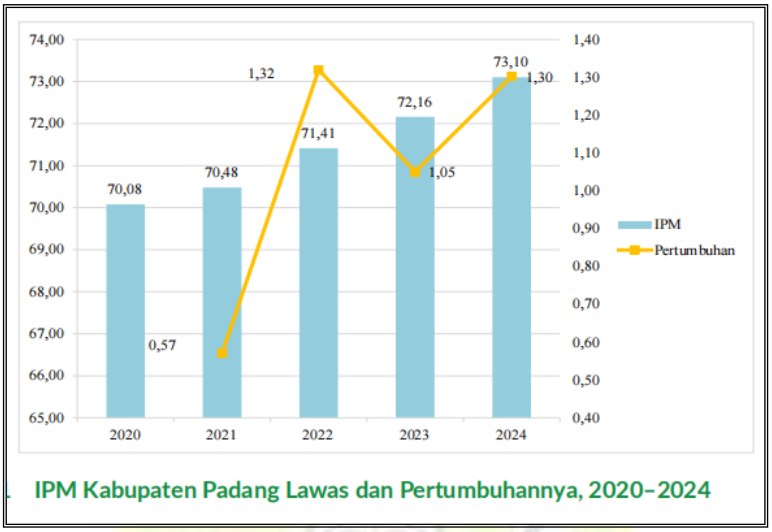
4. Meningkatnya Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat

Pembangunan manusia di Kabupaten Padang Lawas terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kabupaten Padang Lawas sudah berada pada kategori level “tinggi”. Selama tahun 2020–2024, IPM Kabupaten Padang Lawas rata-rata meningkat sebesar 1,06 persen per tahun, dari 70,08 pada tahun 2020 menjadi 73,10 pada tahun 2024.

Peningkatan IPM Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua dari empat indikator penyusun IPM mengalami percepatan pertumbuhan. Pertama, RLS yang tumbuh 2,12 persen pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 hanya tumbuh 1,29 persen. Kemudian, pengeluaran riil per kapita yang tumbuh 4,53 persen dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 2,04 persen. Pertumbuhan indikator ini menggambarkan peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Padang Lawas tahun 2024. Sementara itu, dua indikator lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan. UHH yang tumbuh 0,35 persen pada tahun 2023 dan hanya tumbuh 0,21 persen pada tahun 2024. Lalu, HLS yang tumbuh 2,16 persen pada tahun 2023 dan hanya tumbuh 1,24 persen pada tahun 2024. Perkembangan IPM dan dimensi

penyusunnya selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut. Melalui Gambar , pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2022, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021.

Gambar 3.2
IPM Kabupaten Padang Lawas 2020-2024



IPM Kabupaten Padang Lawas dan Pertumbuhannya, 2020–2024

Tabel 3.5

IPM Kabupaten Padang Lawas Menurut Dimensi Penyusunanya Tahun 2020-2024

Indikator IPM	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,98	71,01	71,27	71,52	71,67
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS	13,03	13,27	13,41	13,70	13,87
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,01	9,02	9,31	9,43	9,63
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	8.807	8.921	9.207	9.395	9.821
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,08	70,48	71,41	72,16	73,10

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kab. Padang Lawas

5. Terpenuhinya Kecukupan Gizi dan Terpenuhinya Bobot Kelompok Pangan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan" dengan satu indikator Skor Pola Harapan Pangan (PPH) adalah sebesar 88,6 persen. Susunan pola pangan harapan Kabupaten Padang Lawas merajuk pada peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 11Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.

Tabel 1. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional*)

No	Kelompok Pangan	% AKG (FAO RAPA)	Pola Pangan Harapan Nasional				
			Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi - padian	40,0 – 60,0	289	1050	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	0,0 – 8.0	105	126	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan Hewani	5,0 – 20,0	157	252	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0 – 15,0	21	210	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,0 – 3,0	11	63	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	2,0 – 10,0	37	105	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	2,0 – 15,0	31	105	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	3,0 – 8,0	262	126	6,0	5,0	30,0
9.	Aneka bumbu dan bahan minuman	0,0 – 5,0	-	63	3,0	0,0	0,0
Jumlah				2100	100,0	-	100,0

Sumber: *) Harmonisasi PPH, Badan Ketahanan Pangan (2019)

Skor PPH aktual dihitung dengan cara membandingkan skor AKE dengan skor maksimum. Skor maksimum adalah batas maksimum skor setiap kelompok pangan yang memenuhi komposisi Ideal. Penghitungan skor PPH masing-masing kelompok pangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor maksimum.
- Jika skor AKE lebih rendah dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor AKE.

Kelompok Pangan PPH meliputi 9 (sembilan) kelompok pangan meliputi Padi-padian, umbi-umbian,Pangan hewani, buah/biji berminyak, munyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan aneka bumbu dan bahan minuman.

Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan.

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG, 2018), Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata orang Indonesia adalah sebesar 2.100 kkal/kapita/hari sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah sebesar 57 gram/kapita/hari. Jumlah konsumsi pangan dikelompokan menurut kriteria yang diadaptasi dari Departemen Kesehatan (1996) adalah sebagai berikut :

a) < 70 % : defisit berat atau rawan pangan
b) 70 s/d 79 % : defisit tingkat sedang
c) 80 s/d 89 % : defisit tingkat ringan

d) 90 s/d 110 % : normal (tahan pangan)

e) > 110% : berlebih

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi Badan Ketahanan Pangan Pusat, maka pola konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan energi (AKE 2.100 kkal/ kapita/hari) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pola konsumsi pangan masyarakat Tingkat Konsumsi
di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Energi Aktual	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Padi-padian	1333	61,7	63,5	0,5	30,8	31,7	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	24	1,1	1,2	0,5	0,6	0,6	2,5	0,6
3	Pangan Hewani	210	9,7	10,0	2,0	19,5	20,0	24,0	20,0
4	Minyak dan Lemak	242	11,2	11,5	0,5	5,6	5,8	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	79	3,7	3,8	0,5	1,8	1,9	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	67	3,1	3,2	2,0	6,2	6,4	10,0	6,4
7	Gula	27	1,3	1,3	0,5	0,6	0,7	2,5	0,7
8	Sayur dan Buah	127	5,9	6,1	5,0	29,5	30,3	30,0	30,0
9	Lain-lain	51	2,4	2,5	-	-	-	-	-
Total		**2162**	**100,0**	**102,9**		**94,6**	**97,3**	**100,0**	**88,6**

Sumber data: Dinas Ketapang Kab. Padang Lawas 2024

Data pada Tabel 3.6 menunjukkan bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi di Kabupaten Padang Lawas sebesar 88,6 termasuk dalam kriteria defisit tingkat ringan yang dicirikan: energi dari padi-padian cukup tinggi di atas norma PPH, energi dari minyak dan lemak relatif sudah memenuhi norma PPH, sedangkan energi dari umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah serta lain-lain masih rendah dibawah norma PPH.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan pangan di masyarakat;
2. Terpenuhinya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
3. Peningkatan pengawasan terhadap mutu pangan yang baik yang berasal dari pangan asal tumbuhan;
4. Kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Harga pangan yang tinggi sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat;
2. kebiasaan pola konsumsi yang kurang tepat seperti lebih banyak mengkonsumsi beras, tepung dan lainnya sehingga asupan makanan kurang beragam, bergizi

seimbang dan aman;

3. Merubah pola fikir masyarakat bahwa harus makan nasi baru kenyang. Padahal masih ada komoditi pengganti beras yang dapat menghasilkan karbohidrat yang besar seperti umbi-umbian, jagung dan lainnya;
4. Perlunya Kesadaran masyarakat akan pentingnya pola pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sehingga dapat tercapai skor pph sesuai harapan.

Solusi atas masalah yang dihadapi antar lain:

1. Mengurangi konsumsi kelompok pangan padi-padian, kelompok minyak dan lemak. Selain itu, meningkatkan konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lainnya;
2. Mendorong masyarakat Padang Lawas agar mampu memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis pangan saja dengan kegiatan diversifikasi pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Padang Lawas.

6. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Jalan dan Tranportasi Publik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Meningkatnya cakupan pelayanan insfrastruktur jalan dan transportasi" dengan satu indikator kinerja Kondisi Jalan Mantap adalah sebesar 34 persen. Nilai kondisi jalan disurvei dengan menggunakan aplikasi *Provincial Kabupaten Road Management System (PKRMS)* dan menghasilkan nilai *Treatment Trigger Index (TTI)* dengan klasifikasi kondisi jalan berdasarkan nilai TTI: 0 – 25: Baik ,25 – 75 : Sedang, 75 – 100 : Rusak ringan dan > 100: Rusak berat. Jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang dibagi jumlah panjang jalan kab/kota dikali 100%.

Tabel 3.7
Kemantapan Jalan di Kabupaten Padang Lawas

No	Tahun	Total Panjang	Mantap_Km	Mantap_%	Tidak Mantap_Km	Tidak Mantap_%
1	2021	1104,10	485,35	43,96%	618,75	56,04%
2	2022	1104,10	495,35	44,86%	608,75	55,14%
3	2023	1104,10	475,03	43,02%	629,07	56,98%
4	2024	1104,10	454,21	41,14%	649,89	58,86%

Sumber Data: Dinas PU Kab. Padang Lawas 2024

Berdasarkan survei PKRMS persentase kemantapan jalan di Kabupaten Padang Lawas mulai tahun 2021 sampai 2024 dikategorikan "Sedang", jalan mantap pada tahun 2024 sebesar 454,21 km dimana Jalan di Kabupaten Padang Lawas

dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana dan standar yang ada, sedangkan jalan tidak mantap juga dikategorikan "Sedang" dimana pada tahun 2024 jalan tidak mantap 649,89 km dari total panjang jalan 1104,10 km, konsidi jalan tidak mantap di Kabupaten Padang Lawas dengan ruas-ruas jalan yang dalam keadaan sehari-hari masih berfungsi melayani lalu lintas, tetapi tidak dapat diperhitungkan umur rencananya, serta tidak mengikuti standar tertentu.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia pelaksana, koordinasi dan komunikasi antar Lembaga baik, serta perlunya kepastian hukum penyelenggaraan jalan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya konsultasi antara pelaksana desain dengan pelaksana operasional dan pemeliharaan jalan
2. Kurangnya pengetahuan dari seluruh aktor penyelenggaraan jalan terhadap pemeliharaan jalan
3. Peraturan yang tidak memperhitungkan pemeliharaan
4. Proses konsultasi stakeholders yang terlibat tidak sesuai dengan harapan
5. Komunikasi yang tidak baik antara aktor penyelenggaraan jalan juga dapat diakibatkan oleh struktur organisasi penyelenggaraan jalan yang kurang efektif.

Solusi atas masalah yang dihadapi yaitu manajemen konstruksi melingkupi Monitoring & Evaluasi komponen yang terukur pada siklus proyek penyelenggaraan jalan mulai perencanaan umum hingga evaluasi pasca proyek. Penerapan yang baik tahapan ini akan 11 mengoptimalkan biaya, waktu dan mutu penanganan jalan.

7. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air bersih dan sanitasi" dengan tiga indikator kinerja yaitu Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 80% dan Persentase rumah layak Huni pada tahun 2024 tidak tercapai dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,52%.

a. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2024 adalah 80% dari target 922 rumah tangga perkotaan dan perdesaan pembangunan MCK tercapai 742 rumah tangga yang sudah memiliki MCK.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menambah anggaran untuk rumah tangga bersanitasi;
2. Tingkat kesadaran Masyarakat pentingnya Rumah tangga bersanitasi;
3. Meningkatkan sosialisai tentang pentingnya rumah tangga bersanitasi.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kebiasaan Masyarakat Membangun Rumah tanpa sanitasi;
2. Belum tersosialisasikan ke Masyarakat Rumah bersanitasi;
3. Anggaran untuk pemenuhan persentase Rumah tangga bersanitasi yang belum memadai.

Solusi atas masalah yang dihadapi:

1. Meningkatkan sosialisasi pentingnya Rumah tangga bersanitasi;
2. Mencari sumber anggaran bantuan dari Pusat baik itu DAK, Hibah maupaun dari APBN guna Pemenuhan Rumah tangga bersanitasi.

b. Persentase Rumah Layak Huni

Persentase rumah layak huni tidak tercapai karena Perubahan anggaran APBD tahun 2024 tetapi Kabupaten Padang Lawas mendapat bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas sejumlah 40 unit dan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman provinsi Sumatera Utara 34 unit bedah rumah layak huni.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

4. Adanya anggaran untuk pemenuhan Rumah Layak Huni;
5. Tingkat kesadaran Masyarakat pentingnya Rumah Layak Huni;
6. Meningkatkan sosialisai tentang pentingnya Rumah Layak Huni.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

4. Kebiasaan Masyarakat Membangun Rumah dari papan yang tidak layak huni;
5. Belum tersosialisasikan ke Masyarakat Rumah Layak Huni;
6. Anggaran untuk pemenuhan Rumah Layak Huni yang belum memadai.

Solusi atas masalah yang dihadapi:

3. Meningkatkan sosialisasi pentingnya membangun Rumah Layak Huni;

4. Mencari sumber anggaran bantuan dari Pusat baik itu DAK, Hibah Maupaun dari APBN guna Pemenuhan Rumah Layak Huni.

c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menurun 1,59% dibanding tahun sebelumnya 69,11% disebabkan karena menurunnya Kualitas Udara IKU 91,02% dan IKA 50% dengan rating " Sedang".Menurunnya Indeks Lingkungan Hudup karena menurunnya Komitmen, jumlah dan kapasitas SDM pengelolaan untuk pengendalian pencemaran udara dan Air.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup menyeluruh di sektor pembangunan yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan dan didukung dengan kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat;

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat ditujukan lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Solusi atas masalah yang dihadapi:

1. Agar indikator pembangunan bidang lingkungan hidup dijadikan sebagai acuan bagi semua pihak untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pengukuran target kinerja pada PRPJMD Kabupaten Padang Lawas sebagian belum disesuaikan dengan target nasional maka dalam laporan ini target pada setiap indikator telah disesuaikan dengan target nasional dan menjadi acuan pencapaian indikator kinerja dan hasil capaian menjadi dasar target capaian berikutnya. Target yang disesuaikan antara lain seperti indikator SPBE, Indeks Pendidikan dan Kondisi Jalan Mantap dapat dilihat pada perubahan target telah dijelaskan pada poin (c) Pengukuran capaian kinerja dibanding dengan tahun sebelumnya.

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Tabel 3.4
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dengan Hasil Kinerja Tahun 2024

No	SASARAAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFESIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian serapan (%)	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks Reformasi Birokrasi	70	57,99 (CC)	83	58.331.239.634	31.056.054.990	53	56%
		Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	65 (B)	56,28 (CC)	87	34.585.000	34.585.000	100	-13%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82)	A (88,66)	108	38.476.000	38.015.133	99	9%
		Opini BPK Terhadap Laporan kinerja Keuangan Daerah	WTP	WDP	85	1.676.063.900	1.541.173.319	92	-8%
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,9	2,17	75	234.370.000	232.874.000	99	-25%
2	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	74,53	18,52	25	29.556.594.971	3.414.533.784	12	115%
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	73	71,67	98	4.296.151.009	4.210.196.583	98	0,2%
4	Meningkatnya derajat kualitas Hidup sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	68,05	73,10	107	34.826.741.561	7.223.785.713	21	418%
5	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	Skor Pola Harapan Pangan (PPH)	77,5	88,6	114	475.279.750	441.705.750	93	66,5%
6	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi publik	Kondisi Jalan Mantap	62	34	55	76.284.323.316	71.346.335.159	94	-41%
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, Air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi	80	80	100	12.823.989.000	12.791.664.000	100	0,3%
		Persentase rumah layak huni	66	0	0	0	0	0	0
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,12	67,52	92	391.306.000	390.322.900	100	-7%
Rata-rata Capaian					**79%**			**74%**	**44%**

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui cost per outcome atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran belum efektif dan efesien sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 6 indikator kinerja yang efesien yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, IKM, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, IPM dan Skor Pola Harapan Pangan (PPH) sedangkan satu indikator Persentase Rumah Tangga bersanitasi 0,0% dan 6 indikator kinerja kurang efesien. Pagu dan realisasi anggaran diambil dari Laporan Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2024 (sumber BPKAD Kabupaten Padang Lawas) dan realisasi anggaran dari Lampiran LRA APBD Tahun 2024, Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dapat dilihat pada link :
https://drive.google.com/drive/folders/1cl9TiEgjBr-cXhA5Dwf147JcZUsjipJa?usp=sharing

Setiap pagu dan realisasi anggaran setiap indikator kinerja pada tabel diatas adalah gabungan setiap program-program prioritas PD pelaksana, seperti pagu indikator Indeks Reformasi gabungan program- program BAPPEDA, Dinas Kominfo, Disdukcapil, Inspektorat, Setdakab, Dinas Kesehatan, BPKAD dan DPMPTSP. Indeks Pendidikan pada tabel diatas adalah gabungan pagu Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip, pagu Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) gabungan pagu program Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan dan Pagu IPM juga dari gabungan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPPKBP3A dan Dinas Ketengakerjaan. rata-rata capaian serapan anggaran yang digunakan 74% sedangkan kinerjanya 79% telah efesiensi 44%. Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sudah lebih efektif dan efesien dibanding tahun yang lalu.

Untuk kedepannya supaya Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas lebih ditingkatkan dalam mencapai kinerja setiap organisasi dalam menggunakan sumber dayanya.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berhasil terlihat dari 13 (tiga belas) indikator sasaran, 7 (tujuh) indikator sasaran telah tercapai dengan kategori "Baik" dengan rata-rata capaian kinerja 79% dengan rata-rata capaian serapan anggaran yang digunakan 74% telah efesiensi 44%.

Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Padang Lawas masih perlu adanya perbaikan, serta komitmen pimpinan dalam manajemen kinerja yang baik.

B. SARAN

Adapun dari indikator sasaran yang sudah tercapai agaar di pertahankan dan ditingkatkan kedepannya, sedangkan pada pencapaian target kinerja kurang agar dilakukan perbaikan dan evaluasi untuk peningkatan di tahun akan mendatang.

Dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, maka diperlukan perencanaan yang efektif menyelesaikan *gap* kinerja dan permasalahan aktual. Oleh karena itu pada penyusunan perencanaan tahun 2025 diupayakan perbaikan dengan melaksanakan forum lintas Perangkat Daerah bersama *stakeholder hexahelix* dengan *cross cutting* pada isu strategis yang terdapat di Rencana Pembangunan Daerah (RPC) dan tematik *cross cutting* arah kebijakan tahun pertama dan permasalahan aktual.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kebupaten Padang Lawas yang menggamberkan capaian kinerja tiap-tiap indikator pada Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Padang Lawas.

Sibuhuan, 03 Maret 2025
BUPATI PADANG LAWAS,

PUTRI MAHKOTA ALAM HASIBUAN,SE

Lampiran

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	**Sasaran Strategis 1** Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah						
	Indikator Kinerja SS						
	Indeks Reformasi Birokrasi	**58.331.239.634**	**31.056.054.990**	**53**	**70**	**57,99**	**83**
	Program 1.1						
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan						
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	1.541.173.319				
	Program Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	49.500.000	49.500.000				
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	6.000.000	6.000.000				
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	47.888.705.534	21.099.725.319				
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik						
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.4370.000	232.874.000				
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	204.148.000	164.404.820				
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.535.358.900	1.385.031.000				
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.017.781.000	964.473.180				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.484.500	113.484.500				
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	38.476.000	38.015.133				
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	46.632.000	46.632.000				
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.277.228.200	1.259.068.157				
	Program pengembangan data/informasi						
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	754.340.000	754.190.700				
	Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Terpadu						
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	99.900.000	87.000.000				

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	**Sasaran Strategis 2** Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat						
	Indikator Kinerja SS						
	Indeks Pendidikan	**2.955.6594.971**	**3.414.533.784**	**12**	**74,53**	**18,52**	**25**
	Program 2.2						
	Program Pendidikan Non Formal						
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.364.631.000	730.110.650				
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	29.026.823.209	2900185680				
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	460.212.912	444.789.254				
	Perhitungan dan Pemetaa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	49.500.000	49.500.000				
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	20.058.850	20.058.850				
3	**Sasaran Strategis 3** Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat						
	Indikator Kinerja SS						
	Indeks Kesehatan	**4.296.151.009**	**4.210.196.583**	**98**	**73**	**71,67**	**98**
	Program 3.3						
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.940.519.802	2.886.190.183				
	Program perbaikan gizi masyarakat						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hami	42.376.000	42.376.000				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60.165.950	56.969.950				
	Program Standarisasi pelayanan kesehatan						
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	158.000.000	154.987.200				
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	740.000.000	715.700.250				
	Program pengadaaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru Paru/ Rumah Sakit mata						
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	315.089.257	314.170.000				
	Program pengembangan lingkungan sehat						
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	40.000.000	39.803.000				

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4	**Sasaran Strategis 4** Meningkatnya derajat kualitas Hidup Sosial masyarakat						
	Indikator Kinerja SS						
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**34.826.741.561**	**7.223.785.713**	**21**	**68,05**	**73,10**	**107**
	Program 4.4						
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	29.026.823.209	2.900.185.680				
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.940.519.802	2.886.190.183				
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya						
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	90.000.000	21.339.950,00				
	Program Pelayanan Pendataan jaminan Bantuan Sosial						
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.068.785.000	832.795.900				
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	525.626.950	433.356.900				
	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan						
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.900	14.299.900				
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.999.700	20.365.700				
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	13.510.000				
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	59.987.000	56.797.600				
	Program Peningkatan Kesempatan kerja						
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	44.943.900				

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
5	**Sasaran Strategis 5** Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan						
	Indikator Kinerja SS						
	Skor Pola Harapan Pangan (PPH)	**475.279.750**	**441.705.750**	**93**	**77,5**	**88,6**	**114**
	Program 5.5						
	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/ perkebunan)						
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	145.966.000	115.316.000				
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	219.994.000	219.634.000				
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerahKabupaten/Kota	44.999.000	44.999.000				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	34.998.750	32.684.750				
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	29.322.000	29.072.000				
6	**Sasaran Strategis 6** Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan						
	Indikator Kinerja SS						
	Kondisi Jalan Mantap	**76.284.323.316**	**71.346.335.159**	**94**	**62**	**34**	**55**
	Program 6.6						
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	65.470.754.199	62.463.293.547				
	Pembangunan Jalan	6513000000	6.143.795.000				
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	700.000.000	692.153.200				
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	182.285.100	172.534.750				
	Program Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan dan Jembatan						
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000	399.686.420				
	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	792.284.017	718.302.242				
	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan						
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.226.000.000	756.570.000				

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
7	**Sasaran Strategis 7** Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, Air bersih dan sanitasi						
	Indikator Kinerja SS						
	Persentase rumah tangga bersanitasi	**12.823.989.000**	**12.791.664.000**	**100**	**80**	**80**	**100**
	Program 7.7.1						
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh						
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	9.050.989.000	9.050.754.000				
	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Daerah						
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.773.000.000	3.740.910.000				
	Sasaran Strategis 7.7.2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, Air bersih dan sanitasi						
	Indikator Kinerja SS						
	Persentase Rumah layak Huni	**0**	**0**				
	Program 7.7.1.2						
	Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						
	Sasaran Strategis 7.7.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, Air bersih dan sanitasi						
	Indikator Kinerja SS						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**391.306.000**	**390.322.900**	**100**	**73,12**	**67,52**	**-7%**
	Program 7.7.1.3						
	Program Penanaman Bambu Pada Kanan dan Kiri Sungai,Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)						
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	250.000.000	249.591.000				
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	93.236.000	92.661.900				
	Program Pengelolaan Persampahan	48.070.000	48.070.000				
	Pengelolaan Sampah						